

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

SKRIPSI

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**



DISUSUN OLEH :

**ANGGI LESTARI
01023130055**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2006**

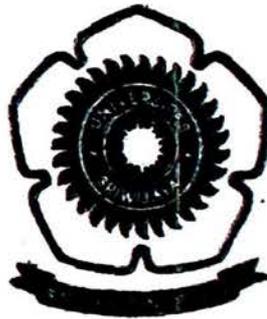
S
352.107
les
a
c-060960
2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**



SKRIPSI

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**



R. 13974 / 14335

DISUSUN OLEH :

ANGGI LESTARI
01023130055

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2006**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANGGI LESTARI
NIM : 01023130055
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEBELUM DAN
SETELAH PEMEKARAN DALAM PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH

Panitia Pengawas Skripsi

Tanggal 20/02 '06 Ketua Panitia


Drs. Burhanuddin, MAcc., Ak

Tanggal 20/02 '06 Anggota Panitia


Drs. Sulaiman S. M. MBA., Ak

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kami telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Alam Nasyrati ; 6-8)

Ilmu (pengetahuan) itu bagaikan biji, amal bagaikan tangkai, sedangkan keikhlasan adalah air penyiramnya yang dapat memberikan kesuburan bagi tanaman itu.

(Imam Al Ghazali)

Kupersembahkan kepada :

Bunda dan Ayahku tercinta

Saudara dan saudariku yang terkasih

Orang-orang disekelilingku yang selalu memberikan

motivasi, semangat, dan doa yang tiada henti

Almamater Akuntansi 2002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa tercurah ke hadirat Zat yang Maha Agung, Allah SWT, penguasa jagad raya yang telah memberikan begitu banyak limpahan kasih sayang, rahmat, karunia, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar, serta shalawat dan salam hanya kepada Sang Kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya yang suci.

Penulis sebagai manusia yang maha lemah dan memiliki begitu banyak kekurangan berusaha untuk mencurahkan segala kemampuan, namun usaha penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta doa dari semua pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Syamsurijal selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Dra. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM., Ak selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Akuntansi dan Bpk. H. Aspahani, SE, MM., Ak selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi Akuntansi dan dosen penguji (atas nasehat dan tawarannya).
3. Bapak Drs. Burhanuddin, MAcc., Ak selaku Ketua Pembimbing Skripsi atas bimbingan dan pengarahan mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Sulaiman S. Manggala, SE, MBA., Ak selaku Anggota Pembimbing Skripsi atas bimbingannya.

5. Bapak Harun Delamat, SE., Ak selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Aryanto Dina, SE., Ak atas bantuan data dan lainnya yang diberikan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
7. Bapak Cris Kuntadi, SE, MM, BAP, Ak atas pinjaman buku-bukunya, SAP-nya, cerita, masukan, nasehat, dan doanya.
8. Bapak Suhel, SE., Msi selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan atas banyak nasehat, doa, dan semangat yang diberikan.
9. Dosen-dosen di Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
10. Yuk Alia, Pak Heru, Kak Indana, Kak Adi, Kak Yitno, Mbak Nihil, dll...terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Ayah dan bundaku atas doa yang tiada henti dan pengorbanan serta perjuangan ikhlasnya selama ini.
12. Keluarga besar Alionar atas limpahan doa dan dukungannya kepada penulis untuk mampu yang menjadi terbaik.
13. Kak Andrie, Mbak Eva, Anca, Kak Didi, Mbak Ummy, Sheila, dan Kak Bayu...terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan baik moril maupun materil.
14. Erida, Kiki, Dietha, Uni Dewi, Patie, Icha, Gotten...terima kasih atas doa, semangat, dan *sharing moment*-nya selama ini.
15. David, Rully , Alen, Tita, Heni, Kiki Nani, Yunita, Nyimas, dan Sus (sukses ya).
16. Eddy, Endgus, Eren, Eti, Nini', Santi, Uwee, Nora, Yoen (atas kebaikan dan semangatnya)

17. Dina, Iis, Hasra, Vera, Ruhi, Lia, Rika (atas bantuannya)
18. Leni, Tien, Ika, Diana, Vivin, Vita, Desy, Ratih, Jaspri, Ma'ul, Yessy, Irti, Krisma, Idah, Putti, Putri, Muna, Erick, Ary, Ully, Leti, Deni, Boni, Helena, Desmoon, Abdul, Febby, Fifhie, Chepy (sukses selalu).
19. Teman-teman di jurusan Manajemen dan Ekonomi Pembangunan.
20. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas doa, dorongan, dan bantuannya penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	

UPT. PERPUSTAKAAN	
KOMUNITAS SRINJAYA	
No. DAFTAR :	050300 iii
TANGGAL :	03-03-06

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1. Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.4.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	6
1.4.3. Teknik Analisis Data	6
1.5. Sistematika Pembahasan	10

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Anggaran Sektor Publik	12
2.1.1. Definisi Anggaran dan Penganggaran	12
2.1.2. Anggaran Sektor Publik	13
2.1.3. Fungsi Anggaran Sektor Publik	14
2.1.4. Pentingnya Anggaran Sektor Publik	17
2.1.5. Karakteristik Anggaran Sektor Publik	18
2.1.6. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik	18
2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah	19
2.2.1. Pengertian Keuangan Daerah	19
2.2.2. Prinsip-Prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan APBD	20
2.2.3. Proses Penyusunan APBD	23
2.2.4. Proses Penetapan APBD	25
2.2.5. Struktur APBD	28
2.2.6. Klasifikasi Pendapatan Dalam APBD	32
2.2.7. Klasifikasi Belanja Dalam APBD	36
2.2.8. Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah	44
2.3. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah	47

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin	54
3.1.1. Gambaran Umum Wilayah	54
3.1.2. Luas Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	54
3.1.3. Keadaan Alam (Iklim)	55
3.1.4. Kependudukan	55
3.1.4.1. Ketenagakerjaan	55
3.1.4.2. Transmigrasi	56
3.2. Struktur Organisasi	57
3.3. Visi, Misi, dan Rencana Strategis	60
3.3.1. Visi	60
3.3.2. Misi	60
3.3.3. Rencana Strategis	61
3.4. Kondisi Keuangan Pada APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	63

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	70
4.1.a. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum Pemekaran	71
4.1.b. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Setelah Pemekaran.....	75
4.2. Analisis Rasio Efektifitas Kabupaten Musi Banyuasin	79
4.2.a. Analisis Rasio Efektifitas Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum Pemekaran	79
4.2.b. Analisis Rasio Efektifitas Kabupaten Musi Banyuasin Setelah Pemekaran	81
4.3. Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Musi Banyuasin	83
4.3.a. Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum Pemekaran	84
4.3.b. Analisis Rasio Efisiensi Kabupaten Musi Banyuasin Setelah Pemekaran	86
4.4. Analisis Rasio Keserasian Kabupaten Musi Banyuasin	87
4.4.a. Analisis Rasio Keserasian Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum Pemekaran	88
4.4.a.1. Analisis Rasio Belanja Rutin Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum Pemekaran	88
4.4.a.2. Analisis Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum Pemekaran	89

4.4.b. Analisis Rasio Keresasian Kabupaten Musi Banyuasin Setelah Pemekaran	90
4.4.b.1. Analisis Rasio Belanja Rutin Kabupaten Musi Banyuasin Setelah Pemekaran	90
4.4.b.2. Analisis Rasio Belanja Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Setelah Pemekaran	91
4.5. Analisis <i>Debt Service Coverage Ratio</i> Kabupaten Musi Banyuasin	92
4.5.a. Analisis <i>Debt Service Coverage Ratio</i> Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum Pemekaran	94
4.5.b. Analisis <i>Debt Service Coverage Ratio</i> Kabupaten Musi Banyuasin Setelah Pemekaran	95
4.6. Analisis Rasio Pertumbuhan Kabupaten Musi Banyuasin	97
4.6.a. Analisis Rasio Pertumbuhan Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum Pemekaran	98
4.6.b. Analisis Rasio Pertumbuhan Kabupaten Musi Banyuasin Setelah Pemekaran	99
4.7. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	100
4.7.a. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum Pemekaran	101
4.7.b. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Setelah Pemekaran	102

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	105
5.2. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kriteria Pengukuran Efektifitas Dengan Penilaian Kinerja Anggaran	49
Tabel 2.2 Kriteria Pengukuran Efisiensi Dengan Penilaian Kinerja Anggaran	50
Tabel 2.3 Skala Interval Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah	53
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk, Jumlah Desa/Kelurahan, Luas Daerah, dan Rata-rata Penduduk/km ² Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	55
Tabel 3.2 Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2001	64
Tabel 3.3. Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2002	65
Tabel 3.4. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Perubahan APBD Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002)	66
Tabel 3.5. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003	67
Tabel 3.6 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004	68
Tabel 4.1 Data Untuk Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2001-2002	71
Tabel 4.2. Data Untuk Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2003-2004	75
Tabel 4.3. Data Untuk Perhitungan Rasio Efektifitas Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2001 – 2002	79

Tabel 4.4. Data Untuk Perhitungan Rasio Efektifitas Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Anggaran 2003-2004	81
Tabel 4.5. Data Bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2004	83
Tabel 4.6. Data Untuk Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2001-2002	84
Tabel 4.7 Data Untuk Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2003-2004	86
Tabel 4.8 Data Untuk Perhitungan Rasio Keserasian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2001-2002	88
Tabel 4.9 Data Untuk Perhitungan Rasio Keserasian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2003-2004	90
Tabel 4.10 Data Untuk Perhitungan <i>Debt Service Coverage Ratio</i> Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2001-2002	94
Tabel 4.11 Data Untuk Perhitungan <i>Debt Service Coverage Ratio</i> Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2001-2002	95
Tabel 4.12 Data Untuk Perhitungan Analisis Rasio Pertumbuhan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2001-2002	98
Tabel 4.13 Data Untuk Perhitungan Analisis Rasio Pertumbuhan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2003-2004	99
Tabel 4.14 Data Untuk Perhitungan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2001-2002	101
Tabel 4.14 Data Untuk Perhitungan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2003-2004	102
Tabel 4.15 Teknik Analisis Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Setelah Pemekaran	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Proses Penyusunan dan Penetapan RAPBD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004	28
Gambar 2.2. Perkiraan Struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005	30
Gambar 2.3. Format Penyusunan APBD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004	32
Gambar 2.4. Struktur Organisasi Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2005	58

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

Tanda Persetujuan Bab I

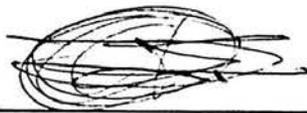
Nama : Anggi Lestari
NIM : 01023130055
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEBELUM DAN
SETELAH PEMEKARAN DALAM PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH

Panitia Pembimbing Skripsi

Tanggal 15/10-05 Ketua Panitia


Drs. Burhanuddin, MAcc., Ak

Tanggal 15/10-05
11.0 Anggota Panitia


Drs. Sulaiman S. M. MBA., Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suksesi kepemimpinan di Indonesia yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 membawa dampak yang begitu luar biasa pada hampir semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan-perubahan itu meliputi perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Perubahan di bidang politik tampak dari bertambahnya jumlah partai politik yang ada, hilangnya dominasi partai politik tertentu dalam kehidupan berpolitik serta kebebasan setiap anggota masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada setiap partai politik yang ada sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Perubahan di bidang ekonomi tampak dari jatuhnya para konglomerat yang selama ini menguasai perekonomian bangsa dan mulai dilakukannya upaya-upaya untuk lebih memberdayakan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Pergantian kepemimpinan tersebut juga membawa dampak kepada semakin bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten maupun Propinsi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi seiring dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka kedua undang-undang tersebut diganti

menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut maka tanggung jawab pemerintah daerah menjadi semakin besar, sedangkan campur tangan atau intervensi pemerintah pusat menjadi semakin kecil sehingga diperlukan suatu sistem perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai wujud pemberian otonomi di era reformasi sekarang ini.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, peradilan, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang diterapkan dalam peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintahan daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk

menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis kemampuan keuangan daerah terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 4 mengenai Pemerintahan Daerah menyebutkan tentang pembentukan daerah yang dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan serta mampu memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (DPR-RI, 2004).

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu bagian dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Pada awalnya Musi Banyuasin dan Banyuasin merupakan satu wilayah, akan tetapi seiring dengan berjalannya otonomi daerah maka daerah tersebut mengalami pemekaran hingga terbagi menjadi dua daerah, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dengan ibukota Sekayu dan Kabupaten Banyuasin dengan ibukota Pangkalan Balai. Setiap daerah memiliki sumber potensial yang dapat digali dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Propinsi. Secara tidak langsung dengan adanya pemekaran ini akan memberikan pengaruh yang cukup berarti pula pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kemampuan keuangan daerah tersebut sehingga penulis mengambil judul "**Analisis**

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Setelah Pemekaran Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.”

1.2 Perumusan Masalah

Kemampuan keuangan daerah menggambarkan aspek kemandirian daerah dalam bidang keuangan. Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu daerah yang mengalami pemekaran perlu untuk melakukan analisis kemampuan keuangan daerah mengingat keterbatasan pendapatan asli daerah tersebut dalam mengimbangi perolehan dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian singkat tersebut maka yang menjadi masalah yang ingin penulis jawab adalah mengenai :

1. Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebelum pemekaran dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah?
2. Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin setelah pemekaran dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebelum pemekaran dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
2. Mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin setelah pemekaran dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil analisa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada saat sebelum dan setelah pemekaran ini diharapkan dapat bermanfaat digunakan untuk tolok ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah,
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah,
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya,
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis kemampuan keuangan daerah yang meliputi analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio keserasian, *debt service coverage ratio*, rasio pertumbuhan, dan rasio kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada saat sebelum dan setelah pemekaran.

1.4.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer ini berupa data mengenai sejarah singkat, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang dalam hal ini berupa laporan keuangan (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin sebelum dan setelah pemekaran yang dapat diperoleh dari :

- a. Bagian Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin
- b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- c. Biro Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin
- d. Instansi-instansi yang terkait lainnya

Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode survei untuk pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan melakukan wawancara kepada pihak atau instansi terkait. Di samping itu, dilakukan dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan penyelidikan melalui sumber dokumen baik yang terjadi di masa lampau atau di masa sekarang.

1.4.3. Teknik Analisis Data

Analisis kemampuan keuangan daerah ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada saat sebelum dan setelah pemekaran. Analisis ini didasarkan pada teknik analisis variabel

(Halim, 2001) yang berupa :

1. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian ini dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

2. Analisis rasio efektifitas

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah pada periode yang ditentukan.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

3. Analisis rasio efisiensi

Analisis ini diperoleh dengan membandingkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dengan realisasi dari penerimaan pendapatan asli daerah itu sendiri.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Jika biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah tidak dicantumkan dalam APBD maka biaya tersebut ditetapkan sebesar 5 % per bulannya dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{(\text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah}) \times (5 \% \times 12 \text{ bulan})}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

4. Analisis rasio keserasian

Rasio belanja rutin dapat diperoleh dengan membandingkan total belanja rutin dengan total APBD tahun yang bersangkutan.

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100 \%$$

Sedangkan untuk rasio belanja pembangunan dapat diperoleh dengan membandingkan total belanja pembangunan dengan total APBD tahun yang bersangkutan.

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100 \%$$

5. Analisis *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman,

sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketentuan itu adalah :

1. Ketentuan yang menyangkut persyaratan

Debt Service Coverage Ratio ini dapat diperoleh dengan menghitung penjumlahan dari pendapatan asli daerah, bagian daerah, dan Dana Alokasi Umum dikurang dengan belanja wajib, yang kemudian dibandingkan dengan total dari penjumlahan pokok angsuran, bunga, dan biaya pinjaman.

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

2. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman

3. Ketentuan yang menyangkut prosedur

6. Analisis rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian.

7. Analisis kemampuan keuangan daerah

Analisis kemampuan keuangan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung

otonomi daerah, yaitu dengan membandingkan total pendapatan daerah tahun t dengan total belanja tahun t.

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah Tahun } t = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah Tahun } t}{\text{Total Belanja Daerah Tahun } t} \times 100 \%$$

1.5. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian tersebut, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta teknik analisis yang digunakan dalam menghitung dan mengukur kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada saat sebelum dan setelah pemekaran dalam mendukung otonomi daerah..

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep dasar anggaran sektor publik (APBD), proses penyusunan dan penetapannya, struktur APBD, komponen-komponen yang terdapat di dalam APBD tersebut yang meliputi klasifikasi pendapatan dan belanja, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Bab III : Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin

Pada bab ini dikemukakan secara singkat mengenai kondisi

geografis Kabupaten Musi Banyuasin dan keadaan struktur organisasional serta tata pemerintahan daerah tersebut.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini dilakukan analisis dan pembahasan secara terstruktur mengenai kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada saat sebelum dan sesudah pemekaran guna melihat kemampuan daerah tersebut dalam mendukung otonomi daerah.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang berkaitan dengan hasil analisis laporan keuangan (APBD) daerah tersebut dan apa saran yang dapat diberikan sebagai upaya penulis dalam memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dalam hal kemampuan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2001). *Buku Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2001*, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2002). *Buku Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002*, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2003). *Grand Quantitative Strategy Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin*, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2004). *Buku Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004*, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bastian, Indra (2001). *Akuntansi di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit BPFE, Cetakan Pertama, November.
- Halim, Abdul (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi I, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Haryadi, Rahmat Tri (2005). *Analisa Rasio Keuangan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Media Akuntansi Edisi 45 Mei 2005, hal 51-53.
- Indriantoro, Nur dan Supomo (1997). *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Republik Indonesia (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia (2004). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia (2004). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Saragih, Juli Panglima (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Dalam Otonomi, Ghalia Indonesia.*

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/2477/SJ Tanggal 5 Desember 2001, *Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.*